

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 48
Desember 2022



MENATA DATA INDONESIA

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Menuju Satu Data Indonesia

Selamat menyambut pergantian tahun saya sampaikan bagi seluruh pembaca Majalah KominfoNext.

Tahun 2022 menjadi penanda bagi Indonesia maju selangkah menuju Satu Data Indonesia. November lalu pemerintah memulai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Menerapkan standar global Tier-4, PDN menjadi salah satu langkah

strategis pemerintah dalam mendorong konsolidasi data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia. PDN Cikarang merupakan satu dari total empat rencana lokasi PDN yang akan dibangun di Indonesia. Tiga lokasi lainnya merupakan Nongsa Digital Park (Batam), Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, serta Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

PDN merupakan salah satu jenis infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keberadaan PDN dinilai menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan, yang akan berdampak baik pada efisiensi belanja karena dapat mengurangi duplikasi belanja. Selain itu PDN juga dapat mendorong integrasi pelayanan publik nasional, serta menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara hingga data pribadi warga negara Indonesia. Tak hanya itu, keberadaan PDN juga dapat mendukung program yang berkaitan dengan pembangunan



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

sumber daya manusia digital.

Edisi terakhir di penghujung tahun 2022 ini kami dedikasikan untuk mengupas progres awal pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia, demi mencapai sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien menuju Satu Data Indonesia.

Desember 2022 juga disemarakkan dengan Digiers Day, acara puncak bagi para talenta digital Indonesia yang sudah mengikuti rangkaian pelatihan digital yang diselenggarakan Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2022 lewat Digital Talent Scholarship. Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo menghadirkan berbagai terobosan pelatihan baik dari tingkat basic skills, intermediate, hingga advance. Digiers Day menjadi wadah pertemuan alumni sekaligus momen untuk berbagi informasi mengenai peluang kerja dan pengembangan talenta.

Bidang pos juga menjadi salah satu perhatian Kementerian Kominfo di tahun ini, salah satunya lewat pengembangan aplikasi Geospasial Pos sebagai pusat data dan informasi industri pos nasional serta aplikasi STATIS (Smart Track and Trace System) untuk mempercepat revitalisasi dan digitalisasi ekosistem pos di Indonesia. Keduanya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan membantu industri melakukan tracking posisi pergerakan logistik berdasarkan geolocation.

Memasuki tahun 2023, Kementerian Kominfo akan kembali melanjutkan lima arahan Presiden Joko Widodo lewat lima program kerja prioritas. Kelima program prioritas tersebut mencakup penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta program pengelolaan spektrum frekuensi. Lalu program standar perangkat dan layanan publik, kemudian program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, program komunikasi publik dan program dukungan manajemen.

Akhir kata, saya ucapkan Selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2023 untuk kita semua. Semoga tahun 2023 menjadi momentum bagi sivitas Kementerian Kominfo untuk berkolaborasi, membangun Indonesia Terkoneksi, Makin Digital Makin Maju

Selamat membaca!

” ”

**Keberadaan
PDN dinilai
menjadi
rekomendasi
terbaik bagi
penyediaan
infrastruktur
TIK
pemerintahan**

” ”

Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali serta kajian mendalam.



Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali serta kajian mendalam.

Menurut Presiden, pandemi Covid-19 makin terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Per 27 Desember 2022, kasus harian hanya 1,7 kasus per satu juta penduduk, positivity rate mingguan berada pada 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada pada angka 4,79 persen, dan kematian pada angka 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah,” ujar Presiden.

“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut—kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan—dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Berdasarkan hasil sero survei yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, tingkat kekebalan masyarakat berada pada angka 98,5 persen per Juli 2022, meningkat dari 87,8 persen pada Desember 2021.

“Artinya, kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis, ini juga sebuah angka yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan Covid-19 dengan baik sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya melalui kebijakan “gas dan rem” sebagai kuncinya. Indonesia juga termasuk 1 dari 4 negara G20 yang dalam 10-11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi.



Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, Kepala Negara meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, Presiden mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko Covid.

“Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan, kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Masyarakat harus makin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” katanya.

Kedua, Presiden meminta agar aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi penguat atau booster.

“Dalam masa transisi ini Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi,” imbuhnya.

Presiden juga memastikan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat akan tetap disalurkan meskipun PPKM telah dicabut. Bansos yang selama PPKM diterima masyarakat akan dilanjutkan pada tahun 2023. “Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” tandasnya.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-resmi-cabut-kebijakan-ppkm-mulai-hari-ini/>



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopolkum Mahfud Md., dan Wamen Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan keterangan pers tentang penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022. Foto: BPMI Setpres/Kris

Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Antisipasi Geopolitik dan Ekonomi Global

Airlangga menjelaskan kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang belum usai juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022. Dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerbitan Perpu tersebut didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.

“Pertama, kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait dengan ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara berkembang yang sudah masuk ke IMF itu lebih dari 30 (negara),” ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menjelaskan kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang belum usai juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. Selain itu, sejumlah negara saat ini juga masih menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan.

“(Penerbitan) terkait dengan geopolitik perang Ukraina dan Rusia, serta konflik lainnya juga belum selesai. Pemerintah juga, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam maupun luar negeri. Apalagi, tahun depan pemerintah menargetkan nilai investasi yang lebih tinggi dari tahun 2022.

“Oleh karena itu, ini jadi penting untuk kepastian hukum diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 diharapkan kepastian hukum bisa terisi,” lanjutnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyampaikan bahwa penerbitan perpu tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi ancaman global ke depan. Menurut Mahfud, apabila langkah strategis ini tidak segera dilakukan, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi situasi global.



“Untuk mengambil langkah strategis ini kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi,” kata Mahfud Md.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-perpu-cipta-kerja-antisipasi-geopolitik-dan-ekonomi-global/>

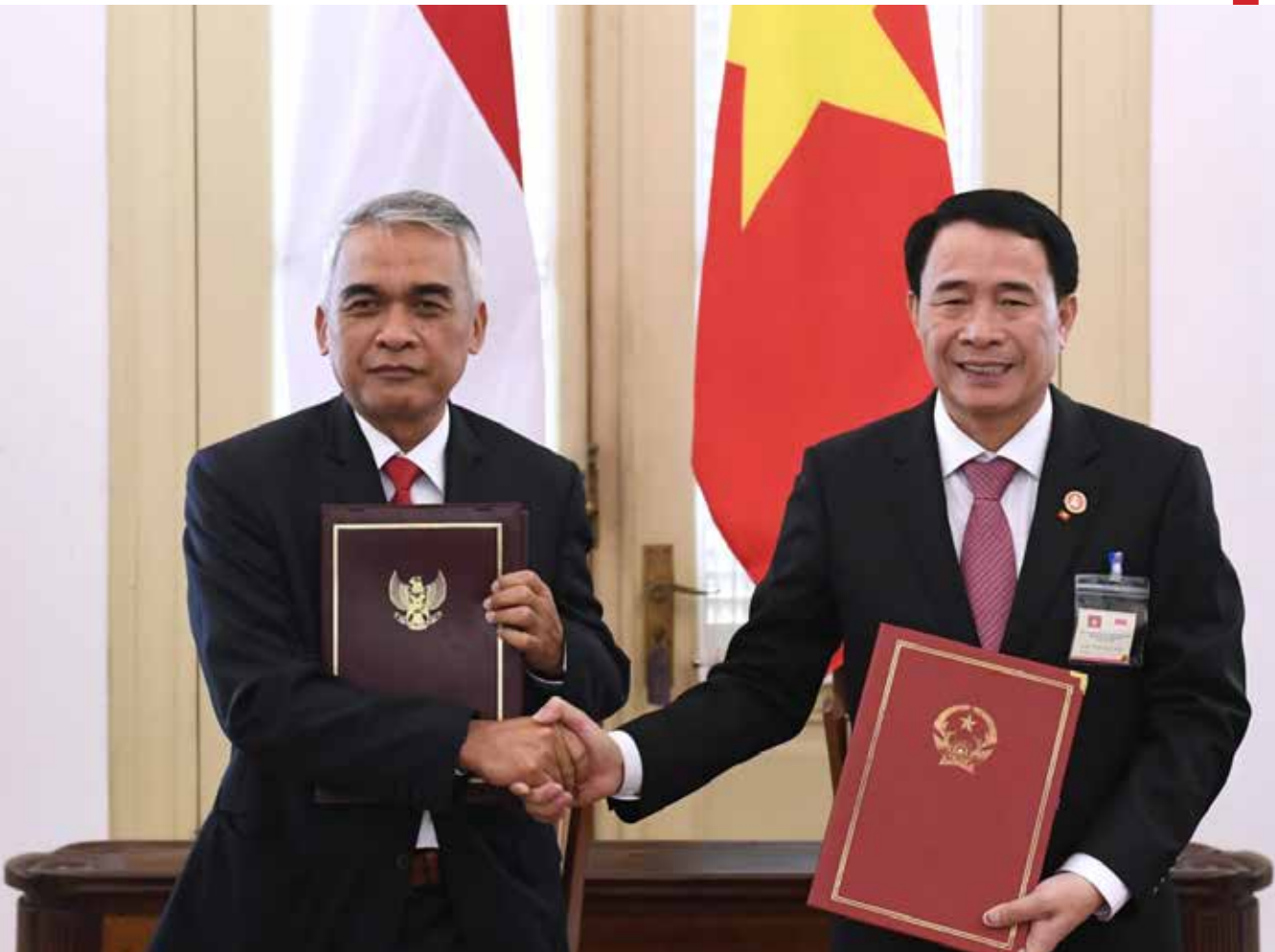


(Penerbitan) terkait dengan geopolitik perang Ukraina dan Rusia, serta konflik lainnya juga belum selesai. Pemerintah juga, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim



Indonesia dan Vietnam Sepakati Kerja Sama dalam Sejumlah Sektor

Presiden Jokowi juga berharap kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam sektor perikanan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dapat segera difinalisasi.



Indonesia dan Vietnam menyepakati sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam kunjungan kenegaraan Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyễn Xuân Phúc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 22 Desember 2022. Saat memberikan keterangan pers bersama, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa terdapat tiga dokumen kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara.

"Hari ini kita berhasil menyepakati tiga MoU yaitu mengenai kerja sama energi dan sumber daya mineral, kerja sama penanggulangan terorisme, kerja sama pemberantasan perdagangan ilegal narkoba," ucap Presiden.

Ketiga kerja sama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam yaitu:

1. Memorandum saling pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama penanggulangan terorisme;
2. Memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama dalam pemberantasan perdagangan gelap narkoba, zat psikotropika, dan prekursorinya; dan
3. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain ketiga kerja sama tersebut, Presiden Jokowi juga berharap kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam sektor perikanan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dapat segera difinalisasi.

"Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan," tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menghargai dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Prioritas keketuaan Indonesia nanti akan menekankan pada peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

"Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, serta peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-dan-vietnam-sepakati-kerja-sama-dalam-sejumlah-sektor/>



Resmikan Bendungan Ciawi, **Presiden:** Mampu Reduksi Banjir di Jakarta

Presiden menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan banjir Jakarta diperlukan upaya konsisten dari pemimpin daerahnya.



Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 23 Desember 2022. Presiden menyampaikan bahwa bendungan yang memiliki luas genangan 39,4 hektare tersebut mampu mereduksi banjir di DKI Jakarta.

“(Bendungan) Ciawi dan Sukamahi bisa nanti akan mereduksi (area terdampak banjir) dari 464 hektare menjadi 318 hektare. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak (banjir) lagi karena adanya waduk Ciawi dan Sukamahi ini,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Bendungan Ciawi yang telah mulai dibangun sejak tahun 2016 tersebut memiliki daya tampung sekitar 6,05 juta meter kubik.

“Untuk Ciawi dan Sukamahi, Bendungan Ciawi ini adalah bendungan kering (dry dam) ini sudah dimulai pembangunannya tahun 2016 menghabiskan anggaran Rp1,3 triliun dan bisa menampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan banjir Jakarta diperlukan upaya konsisten dari pemimpin daerahnya. Selain dengan kehadiran bendungan, normalisasi sungai hingga pengelolaan pompa air juga diperlukan.

“Di sini ada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, saya minta betul agar dituntaskan urusan yang berkaitan dengan banjir di Jakarta secara konsisten, baik yang berkaitan dengan waduk ini selesai. Kemudian normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, urusan sodetan Ciliwung menuju ke BKT, tanggul laut dan giant sea wall serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Direktur Utama PT Brantas Abipraya Sugeng Rochadi.

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/resmi-kan-bendungan-ciawi-presiden-mampu-reduksi-banjir-di-jakarta/>





Presiden Joko Widodo meninjau dan melakukan uji coba proyek kereta lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek, pada Senin, 26 Desember 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Jajal LRT Jabodebek

Menurut Presiden, saat ini progres kereta LRT Jabodebek telah mencapai 87 persen.

Presiden Joko Widodo meninjau dan melakukan uji coba proyek kereta lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek, pada Senin, 26 Desember 2022. Tiba sekira pukul 08.00 WIB di Stasiun LRT Harjamukti, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo langsung meninjau perkembangan proyek LRT dengan dipandu oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal.

Selanjutnya, Presiden melakukan tap kartu multi trip LRT Jabodebek untuk masuk dan naik menggunakan eskalator menuju platform 2. Presiden kemudian naik ke gerbong pertama rangkaian kereta LRT TS 23 yang membawa 5 gerbong kereta lainnya untuk kemudian menuju Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Rangkaian kereta LRT yang membawa Presiden dan rombongan terbatas berangkat pukul 08.16 WIB, dan tiba di stasiun TMII pukul 08.28 WIB. Perjalanan sepanjang 9 kilometer tersebut ditempuh selama 12 menit dengan kecepatan kereta 80 km/jam.

“Sangat cepat sekali dan tanpa masinis,” ujar Presiden dalam keterangannya usai melakukan uji coba kereta LRT di Stasiun TMII, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi proyek kereta LRT Jabodebek yang merupakan hasil karya anak bangsa. “Yang kita senang, kita bangga adalah kereta ini buatan INKA, semuanya buatan INKA, termasuk sistem tanpa masinisnya semuanya dari INKA,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, saat ini progres kereta LRT Jabodebek telah mencapai 87 persen. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dirampungkan agar dapat beroperasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mulai dari depo hingga sinkronisasi sistem.

“Kita harapkan nanti bulan Juni, Juli 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat,” ucap Presiden.

Presiden pun mengaku nyaman setelah melakukan uji coba kereta LRT Jabodebek. Meski demikian, Presiden menyebut masih mendengar sedikit suara saat kereta LRT berada di lintasan yang berbelok.

“Saya tadi nyaman, cepat, dan tidak berisik. Hanya pas belokan aja tadi (berisik),” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/jajal-lrt-jabodebek-presiden-sangat-cepat-dan-tanpa-masinis/>



Kemitraan ASEAN-UE Harus Dorong Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Di tengah ancaman resesi, Presiden mendorong kebijakan yang mempermudah perdagangan dan investasi.



Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting dalam pidatonya pada sesi pleno KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (UE) di Gedung Europa, Brussels, 14 Desember 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting saat menyampaikan pidatonya pada sesi pleno KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (UE) di Gedung Europa, Brussels, 14 Desember 2022.

Pertama, Presiden Jokowi menyerukan kemitraan ASEAN-UE harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah ancaman resesi, Presiden mendorong kebijakan yang mempermudah perdagangan dan investasi. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya terhadap proposal Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang justru berpotensi menciptakan hambatan.

"Indonesia ingin menekankan bahwa pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia secara berkeadilan. Dalam kaitan inilah Indonesia akan terus membangun industri hilirisasi," kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan hanya dengan hilirisasi, Indonesia dapat melakukan lompatan kesejahteraan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong kemitraan ASEAN-UE harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Krisis energi menurut

Presiden merupakan sebuah keniscayaan, namun transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan.

"Saya menghargai dukungan Uni Eropa terhadap Bali Energy Transition Roadmap yang dihasilkan KTT G20 bulan lalu. Kemitraan ASEAN-UE harus memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan," ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mendorong Kemitraan ASEAN-Uni Eropa untuk bekerja sama demi masa depan ASEAN, Uni Eropa dan dunia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

"Kerja sama yang didasari prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan," jelas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam sesi pleno tersebut yaitu para pemimpin ASEAN dan Uni Eropa. Turut hadir pula mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kemitraan-asean-ue-harus-dorong-pemulihan-ekonomi-inklusif-dan-berkelanjutan/>





Pusat Data Nasional

Dorong Implementasi *Data Driven Policy*

Pusat data pertama ini dibangun di Deltamas, Cikarang, Bekasi. Dibiayai melalui Pemerintah Prancis 85 persen dan APBN Rupiah murni 15 persen dengan total nilai kontrak EUR164,6 Juta

Pemerintah memulai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dengan standar global Tier-4 pertama di Indonesia. Dalam acara Groundbreaking Ceremony Pembangunan Pusat Data Nasional (Strengthening of E-Government), di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (09/11/2022).

Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan pusat data yang menyediakan layanan infrastruktur berbagi pakai berbasis cloud untuk instansi pusat dan daerah yang saling terhubung, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat ada sekitar 2700 pusat data atau ruang

server yang beroperasi di 630 Instansi pemerintah pusat dan daerah. Namun dari jumlah tersebut, hanya 3% yang memenuhi standar keamanan internasional.

Keberadaan data yang terpisah-pisah tersebut meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber. Selain itu, setiap instansi memiliki database tersendiri yang kemungkinan berbeda dengan yang dimiliki instansi lain. Inilah mengapa pentingnya Indonesia membangun Pusat Data Nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan PDN itu merupakan kerja sama Indonesia dengan Perancis dengan nilai kontrak EUR164,6 Juta atau setara dengan Rp2,59 Triliun.

"Pusat data pertama ini dibangun di Deltamas, Cikarang, Bekasi. Dibiayai melalui Pemerintah

Prancis 85 persen dan APBN Rupiah murni 15 persen dengan total nilai kontrak EUR164,6 Juta," jelasnya usai acara Groundbreaking Ceremony Pembangunan Pusat Data Nasional (Strengthening of E-Government) di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (09/11/2022).

Menurut Menteri Johnny, PDN dengan lokasi berjarak sekitar 40 Km dari Jakarta tersebut akan memiliki kapasitas Processor 25.000 Cores, Storage 40 Petabyte dan Memori 200 TB. Adapun untuk power supply atau listrik akan disediakan pertama kali sebesar 20 Megawatt dan dapat ditingkatkan sampai dengan 80 Megawatt.

"Pusat data ini dibangun dengan Standar Internasional Tier-4 atau dengan kata lain disebut sebagai uninterrupted atau tidak terputus dengan water cooling system sesuai standar global," jelasnya.

Menkominfo menyatakan pembangunan PDN di Greenland International Industrial Center atau GIIC ini akan berlangsung selama 24 bulan sejak efektif kontrak. Sementara untuk tanggal efektif operasional PDN itu sendiri, dimulai dari terpenuhinya semua condition precedent yang ada di dalam kontrak.

"Salah satunya yang terakhir dipenuhi adalah pembayaran uang muka yang sudah dilaksanakan sebesar 15 persen atau setara dengan Rp376 Miliar," ujarnya.



Pusat data ini dibangun dengan Standar Internasional Tier-4 atau dengan kata lain disebut sebagai uninterrupted atau tidak terputus dengan water cooling system sesuai standar global.





Menteri Johnny mengharapkan pembangunan PDN itu akan dapat mendukung konsolidasi data di lingkungan pemerintah sekaligus efisiensi dalam penggunaan server yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

“PDN ini setelah nanti terbangun kita harapkan menjadi atau dapat berfungsi sebagai konsolidasi data, interoperabilitas data pemerintah. Selama ini digunakan melalui 2.700 pusat data dan server yang tersebar secara nasional baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.

Targetkan Efisiensi Layanan Publik

Pembangunan empat Pusat Data Nasional (PDN) ditujukan untuk mendukung pemerintahan berbasis digital. Penerapan konsep digital government bertujuan mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, serta transparan dan mendorong implementasi data driven policy.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan PDN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong efisiensi, efektivitas, kedaulatan data negara, dan konsolidasi data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia.

“PDN merupakan salah satu direktif Presiden Republik Indonesia dalam rangka mempercepat

transformasi digital di lingkungan instansi pemerintahan,” jelasnya dalam acara “Groundbreaking Ceremony Pembangunan Pusat Data Nasional (Strengthening of E-Government), di Cikarang, Jawa Barat. Rabu (09/11/2022).

Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, dengan adanya Pusat Data Nasional maka akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang canggih dan modern. “Dikarenakan teknologi yang dipasang pada ekosistem PDN, meliputi teknologi cloud computing, big data analytic dan kecerdasan buatan, blockchain, serta metaverse,” jelasnya.

Dirjen Semuel menjelaskan, peletakan batu pertama (groundbreaking) menandai pengenalan proyek pembangunan PDN di Kabupaten Bekasi kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor privat, serta masyarakat.

“Sekaligus dalam rangka penyelenggaraan PDN melalui Proyek Penguatan Infrastruktur e-Government di Kawasan Jabodetabek sesuai amanat Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Infrastruktur SPBE,” jelasnya.

Keberadaan PDN juga menjadi salah satu penunjang utama untuk terlaksananya percepatan transformasi digital di Indonesia. “Khususnya dalam rangka efektivitas, efisiensi, konsolidasi data nasional, keamanan dan kedaulatan informasi negara serta mendorong penyelenggaraan Satu Data Indonesia,” tutur Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

PDN Pertama

PDN Deltamas Industrial Estate tersebut merupakan satu dari empat rencana lokasi pembangunan PDN. Tiga PDN lainnya merupakan Nongsa Digital Park (Batam), Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, serta Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

PDN kedua akan dibangun di kawasan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di mana sudah tersedia jaringan fiber optik yang mampu menghubungkan wilayah tersebut dan sekitarnya ke kawasan barat Indonesia.

"Pemilihan lokasi pusat data di Batam didasarkan keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, air, serta jalur langsung ke tulang punggung internet global. Setelah Batam. Lokasi pembangunan PDN selanjutnya rencananya akan dibangun di IKN, serta Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur," tutur Direktur LAIP Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

Groundbreaking Pusat Data Nasional di GIIC Cikarang dilakukan Menkominfo Johnny G. Plate, dalam acara hadir pula Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo; Staf khusus Menkominfo Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Rosarita Niken;

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakkan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi; serta Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asep Arofah Permana.

Guna mempercepat pengembangan ekosistem digitalisasi di seluruh daerah Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meningkatkan utilisasi sistem informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan melalui gerak lintas direktorat akan mendukung suksesnya P2DD secara optimal.

"Di tahun 2023, Kementerian Kominfo akan melaksanakan utilisasi sistem informasi P2DD, diantaranya untuk melakukan pengisian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD Tahun 2022 di Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).

Menurut Menteri Johnny, sistem informasi P2DD telah dimanfaatkan oleh 543 pemerintah daerah yang mencakup 415 pemerintah kabupaten, 94 pemerintahan kota dan 34 pemerintahan provinsi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan terus mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sistem informasi P2DD, terutama terkait dengan layanan seperti Pusat Data Nasional (PDN), surat elektronik pemerintah, dan helpdesk.





“Sistem informasi P2DD terkait dengan kerja kolaborasi seperti penyediaan domain website p2dd.go.id dan kelola.p2dd.go.id, pemanfaatan PDN, surat elektronik pemerintah, hingga beragam aplikasi yang tersedia,” jelasnya.

Kepada seluruh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang hadir baik secara offline dan online dalam Rakornas P2DD, Menkominfo meminta agar setiap layanan yang berkaitan dengan sistem informasi P2DD untuk disederhanakan.

“Mohon ini semuanya disederhanakan, penyediaan layanan helpdesk secara online, pengisian indeks ETP daerah melalui sistem informasi P2DD oleh seluruh pemerintah daerah. Evaluasi kinerja melalui sistem informasi P2DD dan pengembangan sistem informasi P2DD berupa penyediaan modul penilaian evaluasi tim P2DD, dan interoperabilitas data indeks SPBE dengan Kementerian PanRB,” harapnya.

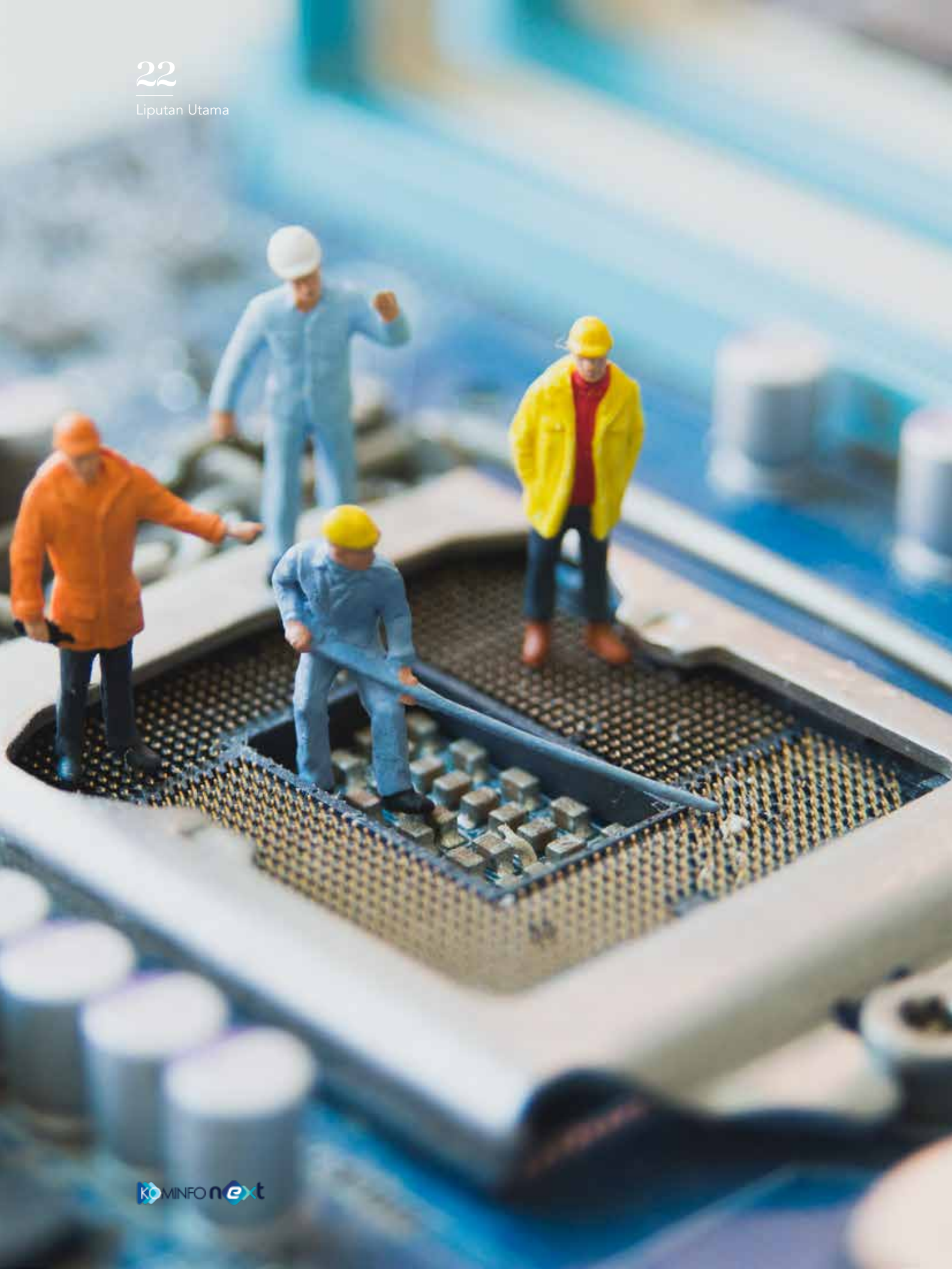
Menurut Menteri Johnny, bentuk nyata dukungan Kementerian Kominfo dalam Program P2DD dengan peletakan batu pertama pembangunan PDN permanen Tier-IV dengan standar global.

“Mudah-mudahan sebelum akhir periode pemerintahan ini bisa kita gunakan. Di saat itu, tentu kami berharap tidak ada lagi pusat-pusat data yang di daerah, yang di atas kementerian dan lembaga. Semuanya terkonsolidasi di pusat data pemerintah. Karenanya, perlu kerjasama terkait dengan anggaran di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota,” jelasnya.



Mohon ini semuanya disederhanakan, penyediaan layanan helpdesk secara online, pengisian indeks ETP daerah melalui sistem informasi P2DD oleh seluruh pemerintah daerah. Evaluasi kinerja melalui sistem informasi P2DD dan pengembangan sistem informasi P2DD berupa penyediaan modul penilaian evaluasi tim P2DD, dan interoperabilitas data indeks SPBE dengan Kementerian PanRB





Pembangunan PDN Perkuat Satu Data Indonesia

“Diskusinya berlangsung di masa Covid antar negara (Perancis dan Indonesia). Ini bukan persoalan gampang, tantangan besar ini berhasil kita lalui, sehingga hari ini tersedia pembiayaannya dan memungkinkan kontrak berjalan efektif”

Pembangunan Pusat Data Nasional sebagai upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di Indonesia terus dipercepat. Keberadaan PDN akan mendukung pelayanan seluruh lembaga pemerintah dan pengembangan talenta digital nasional.

Pembangunan pusat data penting untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara yang lebih efisien dan efektif, termasuk dalam rangka untuk memberikan dukungan interoperabilitas data untuk menghasilkan Satu Data Indonesia atau Data Driven Policy pemerintah.

“Setelah terbangun diharapkan PDN ini akan bisa berfungsi sebagai konsolidasi data dan interoperabilitas data yang selama ini digunakan melalui 2700 server tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga akan ada efisiensi pengelolaan pusat data untuk mendukung peningkatan layanan e-government, dan menghasilkan Satu Data Indonesia guna pengambilan keputusan berbasis data yang akurat,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Pembiayaan pembangunan PDN) bersumber dari bantuan pemerintah Perancis dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G-to-G financing, yaitu bantuan dari pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15 persen.



Pusat Data Nasional pertama di Indonesia ini akan menjadi sumbangan berguna bagi infrastruktur IT Indonesia yang bisa membantu Indonesia menuju salah satu negara pemimpin dalam hal digitalisasi di dunia



Menurut Menteri Johnny, pembangunan PDN ini telah melalui proses panjang, mulai dari tahap negosiasi dan diskusi pembiayaan, sehingga diputuskan konsep pembiayaannya antar pemerintah Indonesia dan Perancis. Selain itu juga telah melalui proses diskusi teknis yang menyeluruh untuk memastikan pembangunannya dilakukan dengan standar tinggi.

“Diskusinya berlangsung di masa Covid antar negara (Perancis dan Indonesia). Ini bukan persoalan gampang, tantangan besar ini berhasil kita lalui, sehingga hari ini tersedia pembiayaannya dan memungkinkan kontrak berjalan efektif,” tuturnya.

Pemilihan kawasan industri Deltamas sebagai lokasi pertama pembangunan PDN juga telah melalui studi komprehensif, termasuk studi 100 tahun terakhir. Karena itu Menkominfo meminta pengelola kawasan bisa memberikan dukungan karena akan menjadi cloud computing area, area industri tingkat tinggi.

Sedangkan kepada jajaran satuan kerja di Kementerian Kominfo dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan PDN, Johnny mengharapkan kerja sama yang baik sehingga



prosesnya bisa berjalan tepat waktu dan akuntabel.

“Proyek ini harus selesai tepat waktu. Semua pihak harus bekerjasama. Saya berharap Pemda Jawa Barat dan Bekasi bisa berkoordinasi sehingga hambatan administrasi bisa dicegah,” pesannya.

Sementara itu Deputy Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis, Arnaud Tripet berharap proyek kerja sama ini bisa makin mendekatkan persahabatan Indonesia dan Perancis. Hal itu bisa menjadi langkah awal yang baik guna menjalin kerja sama berikutnya dalam pembangunan infrastruktur e-government dan e-security di Indonesia.

“Barusan kita dengar bersama kumandang lagu Indonesia Raya yang di dalamnya ada lirik ‘Indonesia Bersatu’. Saya bahagia Perancis bisa menjadi bagian dalam proses penyatuan data nasional Indonesia,” ujar Tripet.

Sedangkan Presiden Direktur Ellipse Project, Olivier Picard, sebagai pimpinan perusahaan terpilih kontraktor pembangunan PDN berjanji akan memberikan teknologi terbaik bagi proyek ini. Gedung PDN yang akan dibangun nantinya tidak hanya menjadi gedung pusat data terbesar di

Asia Tenggara, tapi juga gedung pusat data yang dibangun dengan semangat 'hijau'.

"Pusat Data Nasional pertama di Indonesia ini akan menjadi sumbangan berguna bagi infrastruktur IT Indonesia yang bisa membantu Indonesia menuju salah satu negara pemimpin dalam hal digitalisasi di dunia," terang Picard.

Ditargetkan Selesai 2024

Pembangunan PDN direncanakan berlangsung dalam waktu 24 bulan atau berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Berlokasi di Kawasan Deltamas (Industrial Estate), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pusat data nasional ini memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 terabyte. Untuk tahap awal power supply yang disiapkan sebesar 20 megawatt, kemudian akan ditingkatkan menjadi 80 megawatt.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), serta Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis, Arnaud Tripet, dan President Director Ellipse Project, Olivier Picard.

Pusat Data Integrasikan Seluruh Data Pemerintah

Pemerintah saat ini memiliki 27.000 lebih aplikasi yang datanya tersebar di berbagai kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya PDN seluruh data pemerintah akan disimpan dalam satu tempat. Di sisi anggaran, menurut Menkominfo, kehadiran PDN dapat menghemat APBN. Disebutkan saat ini ada 2.700 pusat data dalam lingkup pemerintah yang sebagian besar memakai ruang server berbiaya besar setiap tahun. Kehadiran PDN akan menggantikan ribuan pusat data tersebut.

Sementara Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pengerapan mengatakan 27.000 lebih aplikasi dan 2.700 pusat data pemerintah tersebut dinilai jumlah yang sangat besar sehingga sulit untuk dikelola dan diintegrasikan.

"Oleh karena itu, PDN memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan tata kelola data pemerintahan berbasis digital (e-governance) menjadi lebih efisien," kata Dirjen Samuel.

Target waktu penyelesaian pembangunan PDN disebutkan cukup ketat yaitu selama 24 bulan, dan harus memenuhi standar nasional, yaitu Standar Pusat Data SNI 81799:2019 dan Standar Internasional Uptime Institute, ANSI/TIA 942-B dengan Strata 4/Tier-4/Rated-4 yang merupakan level tertinggi untuk keamanan pusat data.

Sedangkan Ketua Tim PDN Direktorat LAIP Kominfo, Ade Frihadi mengatakan pembangunan pusat data menggunakan skema Design, Supply, dan Installation (DSI). Setelah groundbreaking akan dilanjutkan dengan fase desain oleh pihak Ellipse Project sambil mengurus perijinan untuk lingkungan atau AMDAL dan izin pendirian gedung dengan Pemda Bekasi. Fase ini ditargetkan selesai dalam tempo tiga bulan.



© 2022 BIRO HUMAS KEMENTERIA

“Kemudian tahap konstruksi akan dimulai di awal tahun 2023. Paralel juga dilakukan pematangan lahan, pemasangan pagar, networking, soil test, dan lain-lain. Setelah konstruksi selesai dilanjutkan dengan integrasi perangkat IT yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan atau di bulan Oktober 2024 dan sudah bisa digunakan pada tahun 2025,” ungkap Ade.

Seperti diketahui, Kemkominfo akan membangun fasilitas pusat data di empat lokasi. Pusat data di Bekasi merupakan pusat data pertama yang dibangun oleh Pemerintah. Pusat Data yang kedua akan dibangun di kawasan Nongsa Digital Park, Batam. Kawasan ini dipilih karena dinilai sudah memiliki infrastruktur yang mampu menghubungkan wilayah tersebut dan sekitarnya ke kawasan barat Indonesia.

Selanjutnya, pusat data ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mendukung pusat pemerintahan baru di IKN Nusantara. Terakhir, pusat data keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang nantinya akan menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur.

Untuk SPBE Nasional, terdapat tiga infrastruktur yakni Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Sedangkan, untuk infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah ada dua, yakni jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, serta sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, terkait dengan pusat data ada beberapa kebijakan di antaranya berbagi infrastruktur agar efisien, standar pusat data kelayakan teknis dan keamanan, instansi pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan PDN, dan pusat data yang telah ada harus memenuhi standar dan kelayakan teknis dan keamanan, serta dalam pemanfaatannya harus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu terkait SDM pengelola Pusat Data, terdapat enam elemen penting yaitu pimpinan/ manajer TI, ahli Quality Control & Insurance, ahli Software Defined Data Center, ahli Mekanikal, ahli Kelistrikan, dan Ahli Asset & Facility Management.

Pengelolaan data center Indonesia harus dilakukan secara profesional mulai dari sisi kelistrikan, pembiayaan hingga SDA harus terpenuhi. Namun, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka harus mendapat kelaikan dari Menteri Kominfo dengan cara lolos audit sistem elektronik dari BPPT dan BSSN. Bagi yang lolos maka Kominfo akan mengeluarkan surat kelaikan operasi, sementara bagi yang tidak lolos maka harus digabungkan dengan data pusat nasional.





Keamanan PDN Tanggung Jawab Bersama Pengelola dan Pemilik Data

Kementerian Kominfo secara masif mendorong penyediaan infrastruktur dan aplikasi untuk peningkatan layanan dan informasi pemerintah. Salah satunya mengawal keamanan informasi melalui fasilitas terpadu berbentuk Pusat Data Nasional (PDN).

Ketua Tim Pusat Data Nasional, Ade Frihadi menjelaskan, pertanyaan yang sering muncul dari publik mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data di fasilitas PDN.

“Pengampu fasilitas PDN adalah Direktorat LAIP Ditjen Aptika, tapi terkait kebocoran data di pusat data adalah tanggung jawab bersama antara Kementerian Kominfo selaku penyedia infrastruktur PDN dan pengguna layanan PDN yaitu K/L dan pemda,” jelas Ade.

Ia menambahkan, pengampu PDN bertanggung jawab memastikan keamanan data di level infrastruktur pusat data dan cloud system. Sedangkan untuk ranah aplikasi dan data menjadi tanggung jawab K/L serta pemda.

“Contohnya tanggung jawab Kominfo seperti penentuan lokasi pembangunan PDN, supply listrik ke PDN serta pengamanan fisik fasilitas PDN,” ujarnya.

Sebelumnya Ade pernah menjelaskan penentuan lokasi pembangunan PDN harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, sesuai dengan Standar Pusat Data SNI 8799:2019 maupun Standar Internasional Uptime Institute, ANSI/TIA 942.

Penentuan lokasi PDN tidak memiliki riwayat gempa, banjir dan potensi gangguan alam lainnya dalam kurun waktu tertentu. Di samping itu juga lokasi yang ditentukan jauh dari pusat keramaian, bandara, kereta api dan beberapa kriteria lainnya.

“Sehubungan dengan jaminan keamanan dan gangguan, baik alam maupun gangguan yang disebabkan oleh manusia kami menyelenggarakan PDN tentunya sudah mengacu pada regulasi, teknologi dan standar yang ada baik standar nasional Indonesia maupun standar internasional,” terangnya.

Untuk mitigasi risiko jika pun tetap ada potensi terjadinya gempa, penentuan lokasi sudah memenuhi kriteria seperti bangunan gedung pusat data mampu menahan gempa sesuai standar yang kriterianya juga ada dalam SNI 8799:2019, Uptime Institute, maupun ANSI/TIA 942-B.

Sementara untuk gangguan atau kendala listrik juga mengacu pada standar yang sama dengan level tertinggi yaitu Strata 4/Tier-4/Rated-4.

Dengan level tersebut mengharuskan semua perangkat termasuk kelistrikan dipersyaratkan adalah 2N atau 2 (N + 1) dengan sumber listrik dari dua gardu yang berbeda, bahkan dua gardu tersebut harus berasal dari pembangkit yang berbeda.

Sehingga apabila terjadi blackout atau pemadaman pada pembangkit yang satu masih ada pembangkit lain yang tetap dapat menyalurkan listrik ke PDN. Maka dengan standar level tersebut, operasional pusat data dikatakan sebagai fault tolerant site infrastructure atau kemampuan sistem untuk tetap beroperasi walaupun terjadi kondisi yang tidak mendukung (fault) pada sistem dengan SLA 99,99 persen. Artinya hanya boleh terjadi downtime

dalam kurun waktu 1 tahun sebesar kurang dari 26 menit.

Ade menambahkan pengelola PDN bertanggung jawab untuk pengamanan fisik dengan mensyaratkan akses ke pusat data, semisal pendataan akses di gerbang masuk hingga masuk ke ruang pusat data.

“Melakukan pendaftaran kembali untuk mendapatkan akses ke ruang data center dan rak server yang akan dituju dengan kartu ID elektronik dan fingerprint. Memasang CCTV dan parameter keamanan lainnya,” imbuh Ade.

Terkumpul di Pusat Data

Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate menegaskan bahwa Pusat Data Nasional hanya berfungsi menyimpan data.

“PDN tidak bisa melihat data, ini tempat menyimpan data. Yang bisa melihat datanya adalah wali data,” ujar Menteri Johnny. Selanjutnya, Menkominfo mengharapkan dengan terbangunnya fasilitas PDN nanti, kementerian/lembaga dan pemda tidak lagi menyimpan data di server masing-masing.

Sementara itu Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Agung Basuki, menekankan pentingnya pemerintah untuk dapat mempertahankan kualitas layanan. “Tantangan yang dihadapi beberapa tahun terakhir dalam penyelenggaraan pelayanan publik semakin compact dan berat. Ditambah kondisi pandemi Covid-19 yang menuntut pemerintah untuk tetap dapat bekerja dan mempertahankan kualitas layanan, meskipun dalam kondisi keterbatasan,” kata Agung Basuki saat acara Rakor Kominfo Bidang Infrastruktur dan Aplikasi dalam rangka Peningkatan Keamanan Penyelenggaraan SPBE melalui Pemanfaatan Pusat Data Nasional, di Bali, Kamis (15/12/2022).



“

Selain bertujuan untuk efisiensi, percepatan digitalisasi nasional memiliki fungsi lain sebagai media kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui PDN instansi pemerintah dapat memanfaatkan layanan komputasi awan yang berbasis teknologi virtualisasi, sehingga bisa fokus kepada core bisnisnya.

”



Pentingnya Identifikasi Kerentanan

Direktur Operasi Keamanan Siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Taufik Nur Hidayat menyatakan untuk mendukung PDN perlu terlebih dahulu memperkuat sistem keamanan siber. Salah satunya melalui identifikasi kerentanan, terutama untuk menghadapi kebocoran data, malware, ransomware, dan spionase siber.

“Apa saja manfaat dari identifikasi kerentanan? Pertama, kita bisa mengevaluasi keamanan sistem elektronik melalui pengujian dan identifikasi kelemahan sistem untuk mengurangi dampak buruk ke depannya. Kedua, kita bisa menganalisis risiko keamanan dan membantu meningkatkan sistem keamanan. Ketiga, kita bisa melindungi data-data penting dan menjaga reputasi organisasi,” terangnya.

Dilanjutkan Taufik, identifikasi kerentanan sendiri bertujuan untuk memverifikasi kemungkinan penerobosan keamanan infrastruktur, mengetahui tingkat keamanan aplikasi, memberikan peringkat kerentanan berdasarkan tingkat ancaman, potensi kerugian, dan kemungkinan eksploitasi.

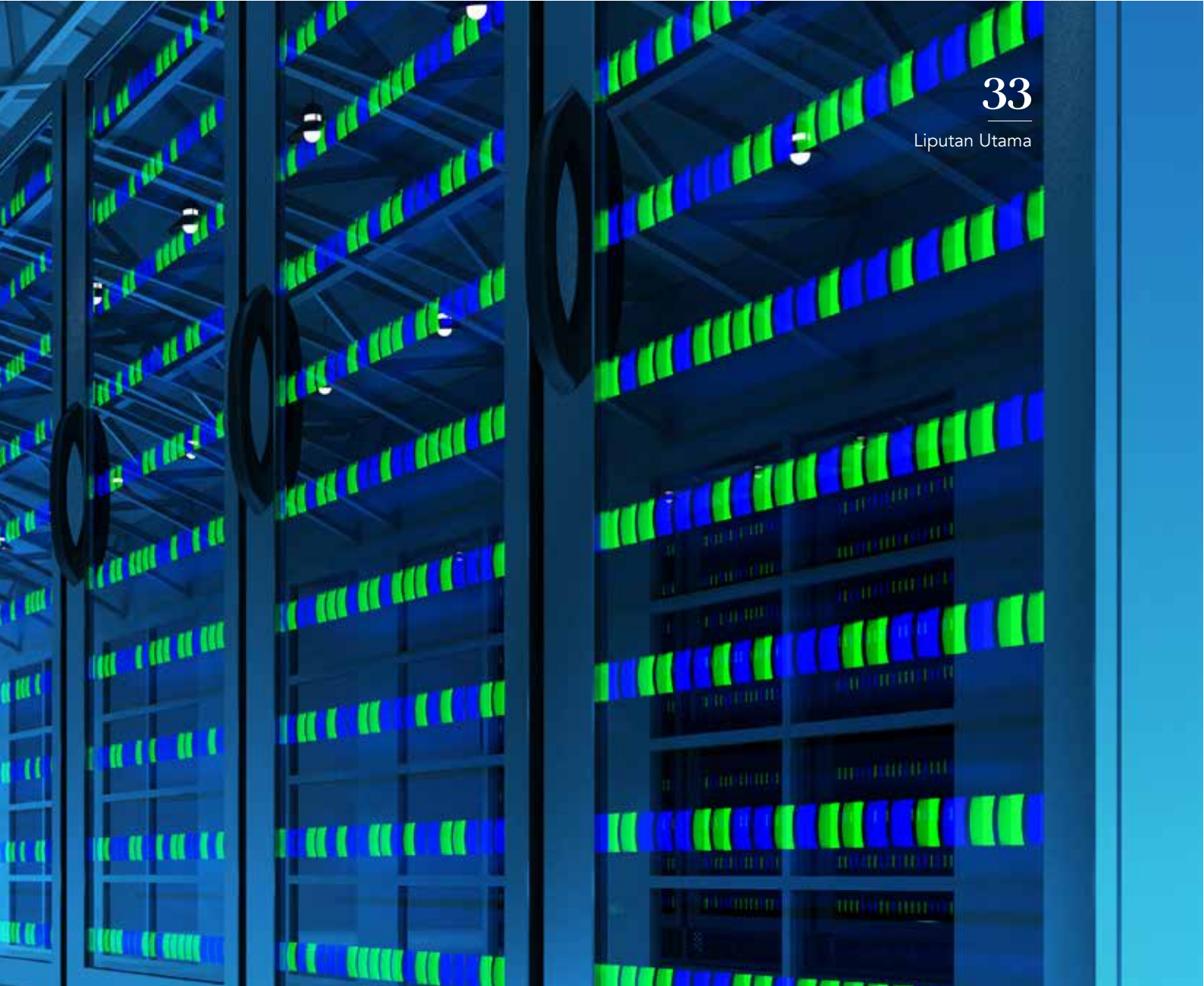
“Mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden, serta mengeksploitasi kerentanan dan memberi bukti dari konsep terhadap kerentanan yang dapat dieksploitasi,” tambahnya.

Mengenal

Pusat Data Nasional

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada beberapa pasal sebagai berikut:

- a. **Pasal 1.** Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data;
- b. **Pasal 27 ayat (4).** Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung;
- c. **Pasal 27 ayat (5).** Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.



Penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan:

Efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja;

Integrasi pelayanan publik nasional; dan

Mempercepat konsolidasi data nasional;

Menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.

Sebagaimana perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di empat lokasi, dengan tahap pertama, yaitu pembangunan di Jababeka dan penyiapan lahan di Batam. Secara paralel juga dilakukan kajian untuk pembentukan kelembagaan PDN serta pengusulannya ke dalam struktur organisasi Kemkominfo

Pusat Data Nasional memiliki fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas Standar Data Center Tier IV & III Design dan Facility dari Uptime Institute (SLA 99,982%) dan ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001.
- Fasilitas Jaringan dengan Bandwidth 20 Gbps IIX, 1 Gbps IX dan Sistem Perangkat Jaringan (Switch, Router) yang memiliki redundancy / double Perangkat.
- Fasilitas Sistem Keamanan yang terdiri dari AntiDDOS, Web Application Firewall (WAF), Network Firewall, Network Antivirus, Anti SPAM, Automatic Vulnerability Management, Application Performance Management, File Integrity Monitoring.
- Fasilitas 2 (Dua) Data Center yang terpisah dari berjalan aktif-aktif.
- Penyediaan Helpdesk, Tim Monitoring Jaringan & Keamanan Informasi dan Engineer On Site (EOS) 24 x 7 (3 shift).

Jumlah Pengguna Layanan Cloud Pusat Data Nasional (PDN)*

Instansi	Tahun 2022
Kementerian / Lembaga	69
Provinsi	16
Kabupaten	129
Kota	39

*Data Direktorat LAIP Juni 2022



Layanan Pusat Data Nasional:

IaaS (Infrastructure as a Service)

- Government Virtual Data Center (VDC)
- Government Virtual Private Server (VPS)

PaaS (Platform as a Service)

- Container Management Platform (Red Hat Openshift)
- Government Hosting & Panel Management (Web Hosting)
- Content Delivery Network (CDN), SMS Gateway

SaaS (Software as a Service)

- Application Performance Monitoring, Cloud Storage, Project Management.
- System

SeCaaS (Security as a Service)

- Network Firewall, Network Antivirus, Anti DDOS, Web Application Firewall, Automatic Vulnerability Management, File Integrity Monitoring, AntiSPAM

Sementara dalam proses pembangunan, Kemkominfo juga menyelenggarakan layanan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau K/L/D. Dengan adanya PDN Sementara ini diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.

Layanan PDN Sementara meliputi:

- a. Penyediaan layanan Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemkominfo);
- b. Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke PDN;
- c. Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE; dan
- d. Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD.

Layanan PDN Sementara Government Cloud

- Infrastruktur as a Service (IaaS)
- Software as a Service (SaaS)
- Platform as a Service (PaaS)
- Security as a Service (SECaaS)

CPU : 860 core
 RAM : 1,400 Gb
 Storage : 1,3 Pb

*Spesifikasi Layanan Pusat Data Nasional Sementara Tahun 2020



Daftar Instansi Pengguna Layanan Cloud PDNS



Instansi	Tahun 2020	Tahun 2021
Kementerian / Lembaga	12	43
Provinsi	4	9
Kabupaten	19	86
Kota	7	24

Pengguna Layanan PDNS 2020 – 2021 (Kementerian/Lembaga)

Tahun 2020		
ANRI (Arsip Nasional RI)	Dewan Kerajinan Nasional	Kementerian Dalam Negeri
BKN	DKPP	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
BNPB	Kementerian Agama	
BSSN	Kementerian ATR/BPN	

Tahun 2021		
Badan Pengawas Pemilu	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BAPPENAS	Kementerian Kesehatan	Komisi Yudisial
BIG	Kementerian Keuangan	Komnas HAM
DKKDN	Kementerian Komunikasi dan UKM	LAPAN
BKPM	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Lembaga Administrasi Negara
BMKG	Kementerian Koperasi dan UKM	Mahkamah Konstitusi
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)	Kementerian Luar Negeri	Ombudsman
BP2MI (BNP2TKI)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perpustakaan-Nasional
BPJS	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	PPATK
B POM	Kementerian Perdagangan	Setjen DPR RI
Badan Pusat Statistik (BPS)	Kementerian Pertanian	Setjen MPR RI
BRIN	Kementerian PUPR	BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
BSN	Kementerian Sosial	Ombudsman
Kantor Staf Presiden (KSP)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Perhubungan
Kemenko PMK		LKPP
Kementerian ESDM		

Sumber:

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/pusat-data-nasional-pdns/>



Terima Kasih atas Dukungan Segenap Pihak

Lima tahun berturut-turut Kementerian Kominfo berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Kategori Informatif



Melanjutkan Lima Program Prioritas Kominfo di 2023

Sumber: indonesia.go.id

Sektor komunikasi dan informatika di Indonesia menunjukkan arah menggembirakan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dilansir 7 September 2022, 62,1 persen populasi di Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021. Tingginya hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 itu mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi.

Di luar itu, berdasarkan laporan Profil Internet Indonesia 2022 yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII, belum lama ini, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia di 2022 dilaporkan mencapai angka 210 juta orang atau sebesar 77,02 persen dari penduduk Indonesia. Angka tersebut naik dibandingkan periode sebelumnya sekitar 73,7 persen (196,71 juta jiwa), dan 2018 penetrasinya hanya sebesar 64,8 persen (171,17 juta jiwa).

Salah satu faktor pendukung peningkatan pengguna internet itu adalah semakin gencarnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membangun sektor ini dalam tiga tahun terakhir. Misalnya, dalam membangun telekomunikasi Indonesia dari pelosok negeri seperti daerah terluar, terpencil, dan terdepan (3T).



Menurut laporan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI), hingga semester pertama 2022, BAKTI telah membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G di 3.816 titik. Rinciannya, sebanyak 1.682 titik merupakan BTS existing yang dibangun sejak 2015-2022 dan 2.134 lainnya adalah BTS di lokasi baru. Hingga akhir 2022, BAKTI menargetkan mampu membangun BTS 4G pada 7.482 titik berkategori 3T.

Pencapaian yang dilakukan Kemkominfo itu tak lepas dari lima arahan Presiden Joko Widodo, terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia. Meliputi, percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan penyiapan peta jalan (roadmap) transformasi digital di sektor-sektor strategis, dan percepatan integrasi Pusat Data Nasional. Selanjutnya, penyiapan regulasi, skema-skema pendanaan transformasi digital, dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia sebagai talenta digital.

Oleh karena itu, Kominfo akan kembali melanjutkan lima arahan kepala negara tadi lewat lima program kerja prioritas untuk 2023. Yakni, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta program pengelolaan spektrum frekuensi. Lalu program standar perangkat dan layanan publik, kemudian program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, program komunikasi publik dan program dukungan manajemen.

Hal itu dikemukakan Menteri Kominfo Johnny G. Plate ketika mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, pada September lalu. Untuk melaksanakan lima program kerja prioritas tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp40,551 triliun. Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari selaku pimpinan rapat, pagu anggaran yang disetujui DPR untuk 2023 sebesar Rp19,703 triliun. Angka itu sekitar 48 persen dari usulan Kemkominfo.

Pagu alokasi anggaran 2023 mencakup lima program kerja prioritas Kominfo, meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Rp13,981 triliun, program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Rp2,577 triliun, dan program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp1,122 triliun. Selanjutnya program komunikasi publik Rp293,203 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp1,727 triliun.



Pencapaian yang dilakukan Kemkominfo itu tak lepas dari lima arahan Presiden Joko Widodo, terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Kebutuhan Anggaran

Menteri Johnny menjelaskan, anggaran yang diajukan Kominfo untuk kelima fokus prioritas itu akan digunakan untuk berbagai program penunjang. Misalnya, untuk pembangunan 332 BTS baru dan pemeliharaan 6.432 BTS existing di wilayah 3T di mana anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp3,823 triliun. Sedangkan, untuk pembangunan 2.504 BTS baru dan pemeliharaan 7.112 BTS existing masih dibutuhkan tambahan Rp6,529 triliun.

Untuk proyek Satelit Satria-II dengan sumber dana dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN), kebutuhan anggarannya sebesar Rp4,784 triliun pada tahun pertama di 2023 dalam bentuk untuk pencairan loan agreement. "Saat ini baru tersedia Rp2 miliar sambil menunggu penyelesaian loan agreement," ujarnya.



Selanjutnya, ia selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa Komisi I setuju agar usulan penambahan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk program mencakup literasi digital baru tersedia anggaran sebanyak Rp550 miliar untuk 5,5 juta peserta dari target menjangkau sebanyak 12,4 juta orang. Sehingga masih dibutuhkan sekitar Rp700 miliar. Untuk program Digital Talent Scholarship dengan target semula 200.000 orang saat ini baru tersedia anggaran untuk 50.000 orang sebesar Rp123,4 miliar, sehingga masih dibutuhkan anggaran tambahan Rp361,2 miliar.

Masih ada lagi pelaksanaan Undang-Undang KIP yang meliputi Pengawasan Pemilu, Portal Informasi Publik, Penyusunan Peta Jalan Keterbukaan Informasi, serta Inisiasi Forum Informasi regional. Kebutuhan anggarannya Rp11,5 miliar dan belum teralokasi.

Hal serupa juga ada pada program peningkatan keamanan siber internal Kominfo dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp34,5 miliar dan belum teralokasikan. "Namun, kami akan memperhatikan dan memastikan keamanan siber sektor Kominfo," tegas Johnny.

Terakhir adalah diseminasi informasi mencakup beberapa program prioritas nasional seperti Pemilu, Ketetapan Indonesia di KTT ASEAN 2023, IKN, dan Piala Dunia U-20. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp275 miliar dan saat ini baru tersedia Rp15 miliar, sehingga masih dibutuhkan Rp260 miliar lagi. Johnny menekankan bahwa diseminasi informasi ini adalah program komunikasi publik yang penting. "Karena terkait dengan hajatan nasional kita, di mana kita akan menyelenggarakannya agar diketahui oleh masyarakat," ucapnya mengakhiri penjelasannya.

Sementara itu, Abdul Kharis menyampaikan, Komisi I juga telah mendengarkan usulan penambahan alokasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp258 miliar atau 43 persen dari target PNBPNP Rp600 miliar. Selanjutnya, ia selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa Komisi I setuju agar usulan penambahan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini mengacu kepada Surat Menteri Keuangan nomor: S-758/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 soal Persetujuan Penggunaan Dana PNBPNP pada kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas 2023.

Berikutnya adalah pembangunan akses internet sebanyak 68.000 titik baru dan saat ini masih tersedia Rp2,529 triliun untuk 9.755 titik baru akses internet dan masih dibutuhkan Rp4,013 triliun. Kemudian proyek hot back-up satellite dengan sumber dana PHLN sebesar Rp1,233 triliun. Disusul kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur digital di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp2,792 triliun dan menurut menteri saat ini belum teralokasikan.

Selanjutnya, program keenam adalah sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar juga belum teralokasikan. Menteri Johnny berharap harus dicarikan anggaran untuk kepentingan sosialisasi agar UU PDP dipahami oleh masyarakat secara luas.

Program lain yang belum dialokasikan anggarannya adalah persiapan Transisi Pusat Data Sementara ke Pusat Data Nasional sebesar Rp75 miliar, saat ini belum teralokasikan. Untuk penanganan tindak pidana ITE, penatakelolaan permainan interaktif, pengendalian sistem dan transaksi elektronik, pengendalian tata kelola PSRE induk, kebutuhan anggarannya. Rp82,57 miliar. "Saat ini baru tersedia Rp53,48 miliar sehingga masih terdapat kekurangan Rp29 miliar," lanjutnya.



Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran

DITUTUP
31 Desember 2022



Terima kasih para tenaga kesehatan dan relawan yang telah berjuang bersama para pasien untuk melawan Covid-19.

Terima kasih sudah saling menjaga untuk sehat dan kuat bersama.

Kunjungan Kerja Menkominfo ke Desa Golo Loni, NTT



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate meninjau lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station di kawasan Tower BTS Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/12/2022).

Menteri Johnny juga berbincang dengan tenaga pendidik serta siswa SD Negeri Inpres Maras mengenai penggunaan internet untuk meningkatkan taraf ekonomi warga desa. Salah satunya tentang penggunaan pembayaran digital tanpa uang tunai (cashless).





Menteri Johnny juga berbincang dengan tenaga pendidik serta siswa SD Negeri Inpres Maras mengenai penggunaan internet untuk meningkatkan taraf ekonomi warga desa. Salah satunya tentang penggunaan pembayaran digital tanpa uang tunai (cashless).



Menkominfo turut mengharapkan pembangunan infrastruktur di Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat dapat diimbangi dengan pemanfaatan untuk e-commerce, edutech, healthtech hingga kota cerdas atau smart city.



Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Golo Loni Yohanes B. Okalung menyampaikan sejak BTS yang dibangun BAKTI Kementerian Kominfo hadir, warga sekitar mulai memanfaatkan akses internet untuk belanja pulsa, memasarkan produk artisan lokal lewat e-Commerce, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.





Hadir mendampingi Menteri Johnny, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha BAKTI Kominfo Dhia Anugrah Febriansa, VP Network Partnership Management PT. Telkomsel Awal Chalik, Direktur Sales Konsorsium Fiber Home Telkom Infra MTD, serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.



Dukung Digitalisasi Desa, Menkominfo Minta Warga Golo Loni Optimalkan Infrastruktur Digital

Menkominfo Johnny G. Plate (kedua dari kanan), saat meninjau lokasi Tower BTS di Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/12/2022). - (Berto)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung digitalisasi desa untuk mengembangkan potensi wisata, kuliner dan produk artisan lokal. Menkominfo Johnny G. Plate mengharapkan pembangunan infrastruktur digital termasuk Base Transceiver Station (BTS) akan dapat meningkatkan taraf ekonomi warga desa dengan memperluas pasar.

“Pembangunan infrastruktur digital telah dilakukan masif di Indonesia. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo berharap pembangunan infrastruktur digital ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ungkapnya saat berbincang dengan Kepala Desa Golo Loni di kawasan Tower BTS Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/12/2022).

Menkominfo menyatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo bersama Telkomsel menghadirkan layanan telekomunikasi untuk memperkuat digitalisasi Desa Wisata Golo Loni.



“Melalui proses yang panjang untuk melakukan bauran pembiayaan dan penyediaan dana pembangunannya, sehingga kami berharap bahwa hasil pembangunan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini,” ungkapnya.

Menteri Johnny mengharapkan agar infrastruktur digital yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik. Apalagi letak BTS berada tepat di samping jalan desa sehingga bisa menjangkau wilayah yang agak luas dekat dengan pemukiman warga.

“BTS dibangun di mana tersedianya listrik, jadi jalan infrastruktur logistik, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur telekomunikasi. Ini tiga infrastruktur yang saling berdekatan dengan jalan desa. Ini ada di Desa Golo Loni. Saya harapkan itu bisa digunakan dengan baik,” ungkapnya.

Pemerintah melaksanakan Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja. Menurut Menkominfo, program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membeli produk dalam negeri, mendorong kemampuan dan keahlian lokal serta mengembangkan karya seni dan kreasi lokal.

“Desa Wisata Golo Loni bisa menjadi ujung tombak artisan lokal, kreasi lokal, kuliner lokal, dan homestay. Kalau Desa Wisata Golo Loni menjadi

desa wisata, desa ini akan punya penghasilan lebih tinggi dari dana desa. Seperti ini, karya unik dari bahan dasar bambu dan ramah lingkungan, keren sekali, harus menjadi model dan masih banyak lagi yang lain,” jelasnya.

Menteri Johnny juga menyatakan Kementerian Kominfo menyediakan pelatihan digital yang bisa dimanfaatkan warga untuk mendorong pemasaran pariwisata Desa Golo Loni.

“Saya yakin desa ini akan bisa bertumbuh dengan baik nanti, jangan lupa agar kita juga punya talenta digital dan adanya program dari Kominfo untuk pelatihan digital. Tolong nanti diambil, agar terbentuk jaringan setidaknya jaringan pariwisata di Indonesia,” harapnya.

Dalam kunjungan itu, Menkominfo memberikan tiga buah laptop untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Golo Loni. Menteri Johnny mengharapkan visi Desa Golo Loni yang sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu Bangga Berwisata di Indonesia Aja dapat terwujud.

“Satu kegembiraan bagi saya bisa datang ke desa Golo Dengan melihat bagaimana energiknya penjelasan dari Kepala Desa Golo Loni Yohanes B. Okalung, visi di mana kepariwisataan juga didigitalisasikan. Saya yakin pemanfaatan infrastruktur TIK di desa ini akan bisa dilakukan secara optimal dan maksimal,” ungkapnya.



Kepala Desa Golo Loni Yohanes B. Okalung mengapresiasi dukungan Kementerian Kominfo ke Desa Golo Loni. Saat ini terdapat empat jenis atraksi wisata andalan yaitu arung jeram, agrowisata sawah, kolam pancing, dan spot foto. Menurut Kades Yohanes, keberadaan jaringan internet dapat mempermudah Kelompok Sadar Wisata untuk mempromosikan potensi wisata desa.

“Digitalisasi sangat membantu kami. Sejauh ini sudah ada sejumlah wisatawan yang berasal dari Amerika, Jerman, Australia, hingga domestik. Mereka menginap sampai seminggu,” ungkapnya.

Yohanes B. Okalung berharap dukungan Kemenkominfo berupa BTS BAKTI Kominfo ini bisa makin mempermudah berbagai aktivitas pemasaran produk wisata, sehingga banyak orang yang ingin berkunjung ke desa itu. “Kalau banyak yang berkunjung, ekonomi desa bisa makin meningkat,” tandasnya.

Hadir dalam acara itu, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha BAKTI Kominfo Dhia Anugrah Febriansa, VP Network Partnership Management PT. Telkomsel Awal Chalik, Direktur Sales Konsorsium Fiber Home Telkom Infra MTD, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tenaga pendidik, siswa SD Negeri Inpres Maras, anggota kelompok sadar wisata, serta tetua adat Desa Golo Loni.



Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto saat membuka kegiatan Digiers Day di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). - (Indra)

Lewat Digiers Day, Kominfo Hadirkan Terobosan Peningkatan Kompetensi Talenta Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan terobosan untuk masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pengembangan talenta digital atau digiers. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan para digiers itu akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sebelum memasuki dunia pekerjaan.

“Hari ini adalah klimaksnya, hari bahagia dinamakan sebagai Digiers Day, yaitu hari untuk para talenta digital. Mereka sudah mengikuti pelatihan, sudah melaksanakan atau belajar di bidang digital pada hari ini kita bersama-sama bergembira, sekaligus memperkenalkan informasi dan peluang pekerjaan setelah berhasil melewati rangkaian pelatihan,” jelasnya saat membuka kegiatan Digiers Day di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Menurut Hary Budiarto, kegiatan Digiers Day menjadi wahana pertemuan alumni sekaligus informasi mengenai peluang kerja dan mengembangkan talenta.

“Untuk yang ingin bekerja kita sediakan lowongan pekerjaan, bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensinya kita sediakan berbagai macam media yang ada. Tadi sudah disampaikan tentang Metaverse, jadi untuk tahun depan para talenta-talenta, para anak-anak muda kita tidak perlu belajar melalui media online atau biasa yang kita sebut video conference atau ketemu langsung, tetapi bisa menelusuri Metaverse yang ada,” tuturnya.

Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo wahana Metaverse yang disediakan mencakup penyediaan modul, simulasi dan informasi pencarian pekerjaan.



“Jadi itu adalah terobosan-terobosan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pelayanan terbaik di dalam pengembangan SDM digital atau penyediaan talenta digital,” ungkapnya.

Kabaltbang SDM Hary Budiarto menjelaskan sebagai salah satu program pengembangan SDM digital yang diinisiasi Kementerian Kominfo, Digital Talent Scholarship memberikan beasiswa bagi anak bangsa agar memiliki skill dan kompetensi bidang teknologi digital.

“Saat ini kita sudah memasuki era digital, sudah memasuki era industri 4.0, dan sudah memasuki masyarakat digital 5.0 maka talenta digital sangat diperlukan. Kita tidak lagi melakukan digitasi, tidak lagi melakukan digitalisasi, tetapi kita melakukan transformasi digital,” tandasnya.

Menurut Hary Budiarto, transformasi digital bertujuan untuk mengubah pola pikir yang konvensional menjadi pola pikir berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, setiap peserta DTS akan ditingkatkan kompetensinya agar memiliki pola pikir baru.

“Transformasi digital menuntut suatu kompetensi yang lebih dari yang biasanya, siapa yang tidak mengikuti maka akan mengalami disruption, itu adalah karakteristik dari transformasi digital. Sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital,” jelasnya.

Selama tahun 2022, Kementerian Kominfo menyediakan beasiswa pelatihan digital untuk 200 ribu orang talenta digital, baik dari tingkat basic skills, intermediate hingga advance. Kabaltbang SDM Hary Budiarto mengharapkan pelatihan tersebut akan terus mendorong terciptanya talenta digital pada tahun-tahun mendatang.

“Pada tahun 2023 kami mengharapkan para mitra bisa mendefinisikan kemudian kita bisa membuka pelatihan baru, kita seleksi para peserta pelatihan tersebut siapa yang berhak untuk bisa masuk langsung bekerja. Jadi tidak seperti yang sekarang, kita buka bursa kemudian interview di akhir tetapi ini akan dilakukan pada saat pelatihan itu dilaksanakan,” jelasnya.



Revitalisasi Ekosistem Pos, Kominfo Luncurkan Aplikasi GeoPos dan STATIS

Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi Geospasial Pos (GeoPos) dan STATIS (Smart Track and Trace System) untuk mempercepat revitalisasi dan digitalisasi ekosistem pos di Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyatakan dua aplikasi itu akan memudahkan masyarakat dan membantu industri melakukan tracking posisi pergerakan logistik berdasarkan geolocation.

"Kominfo tengah mengembangkan aplikasi Geospasial Pos sebagai pusat data dan informasi industri pos nasional yang nantinya dapat diakses oleh publik. Kita juga meluncurkan aplikasi yang namanya STATIS untuk mendukung agar masyarakat lebih memudahkan dalam penyaluran logistik dan barang," jelasnya dalam Seminar Nasional Industri Pos di Era Digital dengan tema "Revitalisasi Penyelenggaraan Pos dalam Mendukung Ekonomi Digital" di Hotel Mulia Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Menurut Plt, Dirjen PPI Kementerian Kominfo, penyelenggaraan pos menjadi salah satu pilar logistik dalam pengiriman barang e-commerce. Oleh karena itu, guna meningkatkan efisiensi bisnis, penyelenggara pos harus memberikan kemudahan kepada pelanggan lewat digitalisasi.

"Pos berperan penting dan integral dalam memastikan barang dikirimkan kepada pelanggan dengan cepat, tepat, dan transparan serta dengan tarif yang kompetitif. Kemudahan tersebut mencakup digitalisasi," ungkapnya.

Keberadaan sistem terintegrasi menjadi kunci memperbesar peluang mendapatkan pesanan. Dirjen Ismail menyontohkan tracking system yang memungkinkan para pelanggan untuk melacak dinamika proses pengiriman barang secara end-to-end.

"Hal tersebut akan mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi komunikasi, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan," tandasnya.



Guna memberikan jaminan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pos dengan menetapkan peraturan ataupun kebijakan. Kementerian Kominfo telah menerbitkan regulasi-regulasi terbaru untuk penataan Penyelenggaraan Pos yang lebih baik di era digital dalam hal perizinan berusaha, kualitas layanan, dan sinergitas dengan sektor-sektor ekonomi lain.

“Sesuai UU Cipta Kerja, Kementerian Kominfo selaku fasilitator berupaya pula mendorong pengembangan industri pos nasional melalui pelaksanaan kegiatan, seperti fasilitasi pembuatan aplikasi STATIS yang dapat diunduh secara gratis dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara Pos sesuai kebutuhan bisnisnya,” jelas Dirjen Ismail.

Kementerian Kominfo juga tengah berupaya menyediakan program yang diarahkan pada modernisasi prangko dan filateli, seperti pengembangan prangko digital dan penyelenggaraan pameran filateli secara digital.

“Kami membuka diskusi dengan pemangku kepentingan agar bisa mengakomodir saran dan kebutuhan industri pos, Tentu harapannya agar dapat bermanfaat bagi perkembangan industri pos nasional serta meningkatkan peran sektor pos dalam mendukung ekonomi digital dan menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Plt. Dirjen PPI Kementerian Kominfo.

Acara yang diselenggarakan secara hibrida tersebut dihadiri oleh Direktur Business Development dan Portofolio Management PT Pos Indonesia, Prasabri Pesti, Wakil Ketua Umum Asperindo, Budiyanto Darmastono, Kepala Peruri Research Institute for Authenticity (PRIfA), Muh. Imam Nashiruddin, Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo serta Plt. Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung.

Menkominfo Ajak Humas Indonesia Perkuat Diplomasi Publik dengan Teknologi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate Ketika memberikan Keynote Speech dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2022 di Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menggelar acara puncak dari rangkaian acara 50 Tahun Perhumas dengan menggelar Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2022. - (Pey)



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak insan hubungan masyarakat di Indonesia memperkuat diplomasi publik Indonesia. Menurut Menkominfo, pendekatan soft power menjadi alat yang paling populer di kalangan berbagai negara untuk melakukan promosi di kancah internasional dengan menggunakan teknologi digital.

“Pendekatan Soft Power dalam diplomasi suatu negara memiliki berbagai manfaat bagi ekonomi, popularitas, dan pengaruh suatu negara di kancah internasional,” tegasnya saat memberikan Keynote Speech dalam Konvensi Humas Indonesia 50 Tahun PERHUMAS di Jakarta Theatre Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Menteri Johnny menyontohkan aktivitas diplomasi publik yang makin populer dan diterapkan berbagai negara. Termasuk Indonesia dengan cara memamerkan kain tradisional, menampilkan pagelaran tarian dan musik daerah, hingga menyuguhkan kuliner nusantara (gastrodiplomacy) kepada masyarakat internasional.

“Ketika perhelatan Gala Dinner G20 beberapa waktu lalu di mana Indonesia turut menyuguhkan Pertunjukan Budaya yang disaksikan oleh seluruh pemimpin G20 dan masyarakat dunia,” ungkapnya.

Konsep soft-power digagas seorang ilmuwan hubungan internasional dan Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Amerika Serikat, Joseph Nye. Mengutip hasil riset Institute for International Cultural Relations, University of Edinburgh, Menkominfo menunjukkan bahwa berbagai upaya soft power seperti keberadaan institusi kultural, konektivitas internet, bantuan internasional, serta ranking kultural suatu negara memiliki pengaruh signifikan atas peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, mahasiswa internasional, investasi dan arus modal asing, serta

pengaruh politik di arena internasional.

“Meningat besarnya peran soft power bagi kemajuan dan posisi Indonesia di kancah internasional, kita perlu bersama-sama memperkuat aspek soft power bangsa,” tandasnya.

Menteri Johnny menyatakan insan humas menjadi salah satu kunci keberhasilan soft power karena menjadi aktor yang mampu mengelola strategi komunikasi yang kuat dan relevan dengan perkembangan zaman.



“Saat ini, tren strategi komunikasi dalam melakukan diplomasi publik banyak dipengaruhi oleh digitalisasi, mulai dari penggunaan media sosial hingga teknologi digital termutakhir guna berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat internasional,” ungkapnya.

Menkominfo menekankan pemanfaatan teknologi digital berupa media sosial, big data, artificial intelligence, maupun Internet of Things yang mampu mempermudah pengembangan strategi komunikasi.

“Cakupan media sosial dan internet yang tanpa batas dapat menjangkau masyarakat, tidak hanya dilakukan di ranah domestik saja, namun juga dalam lingkup internasional. Data yang diperoleh dari kehadiran teknologi tersebut mampu dijadikan dasar dalam pembuatan strategi komunikasi publik, sehingga lebih tepat sasaran dan efektif,” ungkapnya.

Guna meningkatkan kecakapan talenta digital dan mendukung penguatan soft power Indonesia dalam bidang kehumasan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Pranata Humas bagi para calon dan pejabat fungsional humas pada berbagai instansi pemerintahan.

“Serta menginisiasi berbagai pelatihan talenta digital, termasuk bagi para insan humas, agar dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana komunikasi yang efektif,” tutur Menteri Johnny.

Menkominfo mengapresiasi pelaksanaan Konvensi Humas Indonesia yang juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia.

“PERHUMAS telah secara aktif berkarya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para profesional Hubungan Masyarakat di Indonesia. Semoga, di usia emas ini, PERHUMAS senantiasa proaktif dalam pengembangan kapasitas profesi humas tanah air, sehingga tidak hanya berpengaruh dalam dinamika nasional, namun juga memperkuat pengaruh Indonesia di kancah global,” harapnya.

Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Boy Kelana dan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar serta perwakilan anggota PERHUMAS dari berbagai wilayah Indonesia.



Menkominfo Ungkap Peran Frans Seda Jadi Perintis Telekomunikasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan perkembangan teknologi digital saat ini tidak terlepas dari para perintis kebijakan sektor telekomunikasi terdahulu. Salah satunya Franciscus Xaverius Seda atau dikenal Frans Seda yang menjabat Menteri Perhubungan dalam periode 1968-1973.

“Saat itu salah satu portofolio Kementerian Perhubungan adalah telekomunikasi. Landasan kebijakan telekomunikasi saat ini lanjutan dari rintisan kebijakan yang Pak Frans Seda buat yaitu konektivitas fisik dengan membangun bandara dan pelabuhan di seluruh Indonesia dengan tanah yang sangat terbatas sekaligus membuka telekomunikasi,” tuturnya dalam Seminar Nasional Jejak Frans Seda – Perjuangan dan Pengabdian untuk Tuhan dan Tanah Air, di Kampus Atmajaya, Jakarta Pusat, Kamis (01/12/2022).

Menurut Menteri Johnny, pada era Menteri Frans Seda, komunikasi dan telekomunikasi digunakan untuk menghubungkan antarpulau, antaretnik dengan dialek yang berbeda-beda.

“Kalau bahasa persatuan nasional kita itu perlu dikomunikasikan ke seluruh penjuru tanah air dibutuhkan telekomunikasi saat itu. Saat sekarang, telekomunikasi yang dibangun dulu harus ditindaklanjuti melalui transformasi digital yang harus dilakukan secara akseleratif,” jelasnya.

Dalam diskusi itu, Menkominfo juga mengenang Frans Seda yang merupakan tokoh nasional pada tiga zaman yakni sebagai menteri era Orde Lama, menteri era Orde Baru, hingga Penasehat Presiden di era Reformasi.





“Banyak yang dilakukan Pak Frans Seda untuk kejayaan negeri kita, sudah dikenal sebagai tokoh yang menjadi titik simpul antara perjuangan kebangsaan nasionalisme dan keimanan atau religius. Karenanya, tokoh-tokoh seperti Pak Frans Seda ini harus menjadi tokoh panutan, khususnya di era sekarang dimana demokrasi yang sudah berkembang luar biasa, media komunikasi yang sudah digital dan sebarannya luas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan Frans Seda pernah menjabat Menteri Keuangan Periode 1966-1968. Bahkan, menurutnya, Frans Seda tidak saja dikenal sebagai tokoh politik, tapi juga tokoh pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Karena terlibat dalam perang fisik untuk menjaga kemerdekaan dari usaha memecah-belah melawan Belanda. Beliau juga seorang tokoh pendidik yang membentuk lembaga pendidikan,” ungkapinya.

Menkominfo menilai kiprah Frans Seda sebagai tokoh media yang merintis kelahiran Kompas serta ekonom yang telah menyelamatkan Indonesia dari ancaman badai besar pasca-Orde Lama. Dengan berbagai kiprah dan kontribusinya, Menteri Johnny mendukung pengusulan Frans Seda sebagai pahlawan nasional.



"Saya rasa relevan sekali Pak Frans Seda diusulkan sebagai pahlawan nasional, dengan karya-karya tadi sebagai para perintis yang mengisi kemerdekaan kita," ujarnya.

Menteri Johnny juga mendorong Panitia Pengusul Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Fransiskus Xaverius Seda untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dalam persyaratan sebagai pahlawan nasional.

"Saya tentu mendorong agar kepanitiaan itu bekerja dengan cepat dan melengkapi seluruh dokumennya, sehingga bisa segera diusulkan ke Kementerian Sosial dan kepada Bapak Presiden. Harapan saya, karena banyak daftar pahlawan, Pak Frans Seda menjadi salah satu diantara mereka (yang diusulkan sebagai pahlawan nasional)," ungkapnya.

Seminar nasional itu juga dihadiri Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto; Ketua STFT Widya Sasana Malang, Eko Armada Riyanto; Rektor Unika Atmajaya Jakarta, A. Prasetyantoko; Rektor Universitas Islam Indonesia Internasional, Komaruddin Hidayat, serta penulis sekaligus peneliti Yoseph Stanley Adi Presetyo.



Menkominfo Pastikan BBPPT Rampung Tahun Depan

Setelah pekan lalu Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) meninjau pembangunan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, Jawa Barat, giliran Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melihat langsung proses pengerjaan laboratorium terlengkap milik pemerintah tersebut, Jumat (16/12/2022).

Menkominfo memeriksa sejumlah bangunan dan ruangan yang proses pengerjaannya telah mencapai 96 persen. Proyek senilai Rp135 miliar, yang dikerjakan BUMN konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) itu, diharapkan bisa mulai beroperasi pada kuartal pertama 2023. "Hari ini saya secara khusus datang untuk memeriksa pembangunan BBPPT. Fungsi ini sudah bisa 100 persen operasional pada kuartal pertama tahun depan," ujar Johnny.

Gerakan Smart City 2022 Tingkatkan Kolaborasi Antar Daerah

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar seminar dan pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 bertajuk "Recover Together, Recover Stronger" di Jakarta, berlangsung pada 30 November – 1 Desember 2022. Kegiatan dihadiri perwakilan dari 141 kabupaten dalam rangka evaluasi implementasi program Smart City 2022.

"Acara ini diharapkan menjadi ruang apresiasi bagi jajaran kabupaten/kota yang berhasil membuat rencana induk pembangunan Smart City di daerahnya masing-masing. Acara ini merupakan ajang menyatukan komitmen dari seluruh pemimpin daerah dari rencana yang telah disusun hingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," kata Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemkominfo, Bambang Dwi Anggono dalam sambutannya, Kamis (1/12/2022).





Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, KORPRI Dorong ASN Perkuat Digitalisasi Birokrasi

Jakarta Pusat, Kominfo - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat digitalisasi di lingkungan birokrasi. Ketua Departemen Pengelolaan Aset Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Umar Haris menyatakan KORPRI memiliki empat program utama dengan salah satu fokus pada digitalisasi birokrasi.

"Program pertama ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, selanjutnya menguatkan ideologi dan karakter aparatur sipil Negara. Selanjutnya, program perlindungan karir dan bantuan hukum Aparatur Sipil Negara, program peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara," ujarnya dalam Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kemkominfo Masa Bakti 2022-2027, di Gedung Utama Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).

Menurut Umar Haris, anggota KORPRI dituntut untuk memiliki kapasitas birokrasi yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan saat ini dan masa yang akan datang. "Kita perlu mencari cara agar bisa melayani masyarakat dengan makin cepat, makin baik dan makin mudah," ujarnya.

SMFR Transportable Sukses Kawal Refarming di Dua Provinsi

Dukungan perangkat Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Transportable, yang terpasang di sejumlah titik, membuat pelaksanaan refarming di Cluster 6 wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), berjalan lancar. "Refarming Pita Frekuensi 2.1 GHz pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 23:00 Wita di Cluster 6 yang meliputi Provinsi NTB dan NTT berlangsung dengan sukses," ujar Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Kasno, sesaat setelah kegiatan berlangsung.

Melalui siaran persnya, disampaikan refarming dipantau secara online oleh Tim Direktorat Penataan, Balmon Mataram, Balmon Kupang, PT Telkomsel, PT XL Axiata dan PT IOH selaku penyelenggara seluler yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz. Proses pelaksanaan pemantauan refarming mengoptimalkan perangkat SMFR Transportable yang telah terpasang di Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat (Narmada dan Batu Layar), serta Kota Mataram (Sekarbela dan Kantor Balai Monitor). Monitoring cukup dilaksanakan dari Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melalui remote site.



Aptika Siapkan Platform Mandiri Belajar bagi 100 Madrasah

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Ditjen Aptika, telah mengembangkan Platform Mandiri Belajar (PMB) sebagai penunjang layanan pendidikan. Diharapkan platform tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan termasuk madrasah.

"Kami berharap di tahun 2022 akan ada 100 madrasah yang memanfaatkan Platform Mandiri Belajar tersebut," kata Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemkominfo, Aris Kurniawan pada acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PMB Tahap II di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (1/12/2022).



Apresiasi untuk Mitra Kerja Pemelihara dan Pengelola TIK

Tim Kerja Perencanaan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kinerja mitra kerja pemeliharaan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Tim Kerja Perencanaan Program dan Pelaporan Aryo Pamoragung, Jumat (23/12/2022), dalam rapat Laporan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Managed Service) Ditjen SDPPI Tahun 2022 di eL Hotel Royale Malioboro, Yogyakarta.



Musnahkan APT Ilegal, Loka Mamuju Ingatkan Pentingnya ISR

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Mamuju melakukan kegiatan pemusnahan alat perangkat telekomunikasi (APT) ilegal. Melalui pemusnahan APT hasil temuan operasi penertiban itu, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

“Semoga dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, para pengguna SFR dan APT yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, akan tertib dan segera melengkapi ISR-nya,” kata Kepala Loka Monitor SFR Mamuju Muhammad Takdir, Senin (19/12/2022), dalam kegiatan yang diselenggarakan di halaman kantornya.

Ia menegaskan kepada masyarakat, baik yang menjual maupun pengguna APT, selalu memperhatikan keabsahan sertifikat. Pentingnya APT bersertifikat supaya tidak menimbulkan gangguan dalam jaringan telekomunikasi atau tidak saling mengganggu sesama pengguna SFR.



ICT Standardization Forum, SDPPI Gaungkan Keamanan Perangkat

Indonesia ICT Standardization Forum 2022 diharap menjadi momentum penyebaran informasi mengenai capaian standardisasi TIK Indonesia dan mengenalkan tren teknologi TIK masa depan kepada masyarakat.

“Harapan saya, para stakeholders TIK nasional lebih memahami dan menyadari pentingnya sertifikasi dan pengujian perangkat telekomunikasi untuk menjamin perlindungan di bidang kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat sebagai pengguna perangkat telekomunikasi,” kata Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Mulyadi, Rabu (14/12/2022).

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, Pemerintah Gelar Festival Data Regsosek



Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pemerintah menggelar Festival Data Regsosek pada 20-21 Desember 2022 di Jakarta. Festival diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah

dan sejumlah kementerian atau lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Seperti yang sudah diketahui, Registrasi Sosial Ekonomi ini sudah menjadi amanat yang disampaikan Presiden bahwa kita harus betul-betul mengembangkan suatu sistem yang bisa mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI),” kata Plh. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki saat memberikan sambutan di hari kedua festival, Rabu (21/12/2022) di Jakarta.

Dirjen SDPPI Pantau Pembangunan Lab Tapos

Kualitas pembangunan Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) harus betul-betul dijaga. Ke depan, laboratorium ini, akan menjadi kebanggaan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Demikian pinta Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail kepada pihak pengembang pembangunan, agar senantiasa bekerja secara profesional. “Kualitas pembangunan secara keseluruhan harus dijaga. Gedung ini akan menjadi kebanggaan kita di depan tamu Kemkominfo yang akan diundang ke sini,” kata Ismail, Jumat (9/12-2022).



Kominfo Gelar Siberkreasi Netizen Fair 2022, Ajak Gen-Z Lebih Cakap Digital



Kementerian Kominfo menggelar acara Siberkreasi Netizen Fair 2022 untuk mengajak Gen-Z lebih cakap di ruang digital. Berbagai seminar dan pelatihan mendorong Gen-Z untuk kreatif membuat konten promosi, public speaking, produksi podcast, maupun pencegahan hoaks.

"Gen-Z banyak berkontribusi di dunia digital untuk mengembangkan berbagai kreativitas hingga bersahabat dengan media sosial," kata Dewan Pengarah Siberkreasi, Marcella Zalianty saat mengisi acara Obrol Obrol Literasi Digital (OOTD): Problema Gen-Z di Era Digital pada kegiatan Siberkreasi Netizen Fair 2022 di Yogyakarta, Sabtu (10/12/2022).



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

“

...Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
(Matius 2:12)

”

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Mengucapkan

Selamat Natal

25 Desember 2022

&

Tahun Baru

1 Januari 2023

Johnny G. Plate
Menteri Kominfo RI